

Pengelolaan Aset Pemda KKR, Dinilai Kurang Beres...?



SUJIWO, SE

dimintai tanggapannya diruang kerjanya beberapa waktu lalu, menurutnya penilaian atas laporan pengelolaan keuangan dan aset Pemda KKR memang perlu mendapat perhatian semua pihak, "Temuan yang dilakukan oleh pihak BPK tersebut bukan saja masalah pengelolaan

Menurutnya dalam penilaian tersebut, kalau masalah keuangan mungkin masih dapat dipahami dan tidak terlalu signifikan, meskipun diakuinya juga masih ada temuan-temuan yang kurang "pas" dalam pengelolaannya, tanpa menyebutkan apa yang menjadi penyebab "kekurangpasnya" itu lebih jauh kepada Koran ini, namun masalah pengelolaan aset pemda KKR sejauh ini dikatakan belum terlihat adanya penataan yang baik, terukur dan terarah terutama bila ditinjau secara administrasi, sehingga mendapat penilaian "miring" dari pihak BPK, "yang perlu publik ketahui dan pahami sehubungan dalam penilaian itu, sebenarnya lebih dominan temuan difokuskan pada masalah pengelolaan aset, tapi bukan berarti masalah laporan keuangannya terabaikan, yang memang belum terlalu signifikan dan dinilai masih pada batas kewajaran" jelas Sujiwo, SE.

Masih menurut Sujiwo, kesan "kekurangberesan" dalam menyikapi pengelolaan aset Pemda KKR ini, barangkali disebabkan karena masih pada masa transisi akibat pemekaran dari kabupaten induk (Kabupaten Pontianak, red) waktu lalu, dan diantara aset-aset yang diserahkan kepada pemda KKR itu misalnya seperti PDAM, gedung bangunan, UPT-UPT dan bentuk-bentuk fisik lainnya.

Menyinggung sejauh mana penilaian tentang kinerja pimpinan teras (Bupati, Wki Bupati dan Sekda,

red) dipemda KKR, ia menganggap relatif cukup baik, meskipun diakuinya masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahannya, "karena itu saya berharap, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang merupakan pimpinan daerah harus menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi, membantu dan menolong, sebab sangat berat sebenarnya mengemban tugas amanat rakyat" ujarnya.

Ia juga tidak menafikan sekaligus merasa khawatir apabila hal itu tidak dijalankan oleh para pimpinan kabupaten tersebut, maka akan mengalami persoalan berat dikemudian hari yang justru menurutnya akan memicu munculnya faksi-faksi atau kelompok-kelompok diantara para elit pemda itu sendiri, akibatnya roda pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik, dan diyakininya misi dan visi pemda KKR (Moto KKR "Terdepan dan Berkualitas, red) tidak akan tercapai.

Karena itu dari pihak DPRD KKR akan selalu melakukan pengawasan serta mengkritisi, "Kami akan selalu melaksanakan tugas-tugas legislasi sebagai bentuk sikap kontrol terhadap pemerintah, namun terkadang tidak dipublikasikan, artinya hal ini disampaikan dalam momen-momen penting seperti dalam rapat sidang paripurna, pandangan umum maupun pendapat akhir dewan, tidak lupa juga kami juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan beberapa program yang barangkali patut untuk diberikan penghargaan" tutur Sujiwo, SE.

Masalah Tapal Batas Antar Desa
Persoalan menyangkut tapal batas

antar desa yang berdampingan serta kerap menjadi bahan sorotan dan keprihatinan khususnya bagi warga masyarakat KKR, yang dikhawatirkan dapat memicu pergesekan antar warga, terutama pada warga yang areal lahannya berdekatan dengan wilayah tapal batas, ternyata menjadi perhatian tersendiri bagi ketua DPRD KKR ini.

Menurut Sujiwo, permasalahan tapal batas antar desa yang ada di kabupaten Kubu Raya ini, memang diakuinya masih banyak menyimpan persoalan, "kira-kira ada sekitar 80% tapal batas di kabupaten ini mengandung masalah yang perlu segera dituntaskan, dan penuntasannya bukan hanya pada persoalan strategi maupun ketersediaan anggaran, tapi juga penanganannya harus melibatkan melalui lintas sektoral dari elemen-elemen masyarakat" katanya.

Oleh karena itu kedepan (Tahun 2011, red) ini, ia berharap diupayakan segera untuk turun kelapangan dan membentuk sebuah team, dan ia juga menambahkan bahwa dalam menyikapinya pihak DPRD hanya sebatas memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, "kami hanya dapat memberikan sebagai bentuk kontrol produktif saja secara lintas sektoral, baik kepada warga masyarakat, kades, camat, BPN maupun berbagai elemen terkait lainnya" ungkap Sujiwo, SE seseorang yang berpenampilan cukup ceria ini saat dikonfirmasi Swara keadilan disela-sela kesibukannya beberapa waktu yang lalu. (anggie)

Hasil penilaian yang ditujukan kepada pemda KKR (Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, red) oleh BPK Perwakilan RI Provinsi Kalbar dengan "opini tidak wajar", sepertinya diakui oleh Sujiwo, SE ketika dijumpai untuk

keuangan tapi juga termasuk aset-aset yang ada memang masih perlu mendapat perhatian untuk disadari" ungkap seorang figure public yang juga menjabat sebagai ketua DPRD KKR ini kepada Swara Keadilan.